

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya membutuhkan interaksi, pengakuan, dan kerjasama dengan manusia lain di dalam suatu kelompok. Di dalam kelompok, manusia memperoleh identitas bersama atas dasar sejarah, kesamaan kepentingan, dan budaya. Di satu sisi terdapat persaingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau sekedar terjadinya persinggungan dalam memperebutkan posisi maupun kepentingan tertentu. Di sisi lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain memutuskan untuk membina hubungan baik, menjalin kerjasama, hingga membentuk suatu aliansi dengan alasan mencapai tujuan bersama melalui konsolidasi kekuatan.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu negara membutuhkan dengan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena tidak ada negara di dunia yang mampu sepenuhnya self-sufficient. Dalam konteks ekonomi, peradaban manusia selama ribuan tahun membuktikan pentingnya kerjasama dalam perdagangan internasional dalam suatu negara yang membutuhkan komoditas tertentu negara lain yang mampu memproduksi komoditas tersebut, namun membutuhkan peningkatan pendapatan (comparative advantage). Sebagai contoh, peradaban Yunani Kuno yang sebagian besar polisnya memproduksi peralatan perang, mengekspor komoditas tersebut dan harus mengimpor komoditas gandum dari Mesir Kuno sebagai

sehingga tidak memungkinkan dibangunnya kawasan pertanian dalam skala besar .
itu, supply and demand yang dinamis membuat suatu negara harus memperluas kerjasama
dengan negara lain agar tidak terpaku pada satu line perdagangan saja.

Hubungan internasional menurut konteks spasialnya, terdiri dari regionalism dan
global. Regionalisme terbentuk akibat factor-faktor seperti persamaan sejarah, kondisi
politik dalam negeri, corak social dan budaya, dan kepentingan nasional. Yang terpenting
dari terbentuknya regionalism ini merupakan implikasi dari inisiatif negara-negara di
kawasan untuk menjalin koordinasi demi mencapai kepentingan nasional masing-masing
atau dapat diartikan mencapai tujuan nasionalnya. Sehingga, negara yang terlibat dalam
pakta regionalisme memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dan jangka panjang dari
kebijakan yang berlaku di dalam kerjasama tersebut, bukan justru berada dalam posisi
dirugikan atau bahkan membahayakan salah satu unsur pokok negara itu sendiri,
rakyat secara mayoritas.

Indonesia sebagai negara dengan letak geografis yang strategis, tempat pertemuan
benua yaitu Asia dan Australia, potensi pasar yang besar, dan produsen beras terbesar
di dunia menjadi mitra strategis bagi negara-negara di dunia, termasuk negara-negara
Tenggara. Paska 1965, Indonesia mengharapkan terbentuknya stabilitas kawasan dan
berusaha melaksanakan politik bebas aktif dengan menjalin hubungan baik dengan
berbagai negara di dunia. Maka, pada tahun 1966 Normalisasi Hubungan Bilateral

Indonesia-Malaysia berhasil dicapai dan Indonesia pun menjadi salah satu negara pendiri ASEAN.²

Association of South East Asia Nations (ASEAN) dibentuk di Bangkok tahun 1967 untuk menciptakan lembaga yang akan membantu membawa kawasan Asia Tenggara dalam kedamaian, kebebasan, dan kemakmuran bagi rakyat masing-masing negara anggota. Para delegasi negara-negara ASEAN dalam ASEAN Summit di Kuala Lumpur bulan Desember 1997 yang menghasilkan ASEAN Vision 2020, terdapat rencana untuk mengarahkan terwujudnya kawasan yang memiliki visi, mengusung perdamaian, menjaga stabilitas dan meningkatkan kemakmuran, terikat bersama dalam kerjasama yang adil, demokratis, dan dalam lingkungan yang harmonis, pembangunan yang dinamis, bahkan peningkatan integrasi ekonomi dan dalam sebuah masyarakat yang saling peduli, memiliki kesadaran hubungan sejarah antar negara ASEAN, peduli pada warisan kebudayaan, dan berada di bawah identitas regional pada umumnya.

Selanjutnya, mengingat Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) di bulan Oktober 2003, yang berusaha memmanifestasikan ASEAN Vision 2020 dengan mengatur keberhasilan dalam membangun sebuah Masyarakat ASEAN tahun 2020 yang terdiri atas tiga pilar, yaitu masyarakat politik-keamanan, masyarakat ekonomi, dan masyarakat social-budaya, maka ASEAN perlu menjamin terwujudnya perdamaian jangka panjang, stabilitas, dan kesejahteraan yang merata di kawasan ini. Namun, karena pertimbangan konstelasi global yang dinamis dan pernyataan kesiapan seluruh negara ASEAN maka

menghasilkan persetujuan negara-negara ASEAN di Cebu, Filipina tahun 2007, manifestasi Masyarakat ASEAN mengalami akselerasi sehingga yang semula ditargetkan terwujud pada tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015.³

Sebagai bentuk manifestasi regional Asia Tenggara yang integratif dan maju dalam perekonomian maka ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan salah satu hasil rencana jangka panjang ASEAN akan dimulai pada tahun 2015 mendatang. Ekspektasi dari MEA ini di antaranya adalah mewujudkan kawasan yang kompetitif dari segi ekonomi di perdagangan bebas saat ini, mencapai pembangunan yang merata bagi negara-negara anggota ASEAN, dan meningkatkan secara signifikan distribusi dan percepatan pergerakan barang maupun jasa di dalam kawasan Asia Tenggara.⁴

Karakteristik dan elemen dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, pertama mencakup pasar dan sentra produksi yang tunggal, yang implikasinya adalah arus komoditas, pelayanan, investasi, keuangan, dan pekerja terlatih yang bebas sesama negara ASEAN. Kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif yang menghasilkan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, hak intelektual, pembangunan infrastruktur, dan perpajakan. Ketiga, pembangunan ekonomi yang merata seperti rencana mewujudkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Yang keempat, integrasi menuju ekonomi global dengan pendekatan yang koheren menuju hubungan ekonomi eksternal dan meningkatkan partisipasi dalam jaringan suplai global.

Salah satu poin dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini adalah liberalisasi berbagai komoditas dan pengenaan tariff sebesar 0%. Namun, Indonesia melalui pernyataan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, di dalam ASEAN Economic Minister's Meeting (AEM) ke-46, yang diawali pertemuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-28 di Nay Pyi Taw, Myanmar berhasil mendapatkan persetujuan seluruh negara ASEAN mengenai keberatan Indonesia mengikutsertakan komoditas beras dan gula dalam MEA 2015 mendatang. Sehingga tarif impor untuk komoditas beras tidak mengalami perubahan yaitu berada dalam kisaran 20%.⁵

B. Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menolak pemberlakuan tarif nol persen terhadap komoditas beras dalam MEA 2015?

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan

⁵ Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (DJKPI). [Ditjen.kemendag.go.id/website_kpi](http://ditjen.kemendag.go.id/website_kpi). 26 Agustus 2014

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.⁶

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka berpikir.⁷

Penelitian ini berusaha melakukan eksplanasi pengambilan keputusan oleh Kemendag dalam pengajuan ketidakikutsertaan komoditas beras dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Subyek dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Perdagangan yang memiliki fungsi diantaranya sebagai pengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi amanah lembaga tersebut dan Kementerian Pertanian yang berfungsi memberdayakan sektor pertanian Republik Indonesia.

1. Politik Luar Negeri

Seperti Holsti, definisi yang luas diberikan oleh Christopher Hill yang menyatakan PLN sebagai 'jumlah hubungan luar resmi yang dilakukan oleh actor indenpenden (biasanya negara) dalam hubungan internasional' (Hill, 2003: 3).

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Jakarta: 2012, hal. 79

⁷ Ibid, hal. 80

Dewasa ini pada dasarnya politik luar negeri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada UUD 1945. Arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Adapun berdasarkan RPJM Nasional sasaran politik luar negeri Indonesia pada tahun 2004-2009 yang hendak dicapai, sebagaimana digariskan Kementerian Luar Negeri RI, yakni: "Meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional [untuk] menciptakan perdamaian dunia, pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan internasional, serta mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik demi mendukung pembangunan nasional".

Sehingga, politik luar negeri merupakan media untuk merepresentasikan kepentingan nasional suatu negara untuk dapat memenuhi kepentingan tersebut.

2. Kepentingan Nasional

Menurut Merriam-Webster, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.⁸

Kepentingan nasional juga berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan "tujuan nasional." Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ..."

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:⁹

⁸ Merriam-Webster.com/dictionary/national interest

⁹ UUD 1945 - Mahkamah Konstitusi RI: www.mahkamahkonstitusi.go.id/UUD1945 . November 2014

(a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Daniel S. Papp, kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya¹⁰

Sehingga dalam konteks posisi Indonesia di tingkat regional, yaitu Asia Tenggara, bahwa di dalam memprioritaskan kepentingan ekonomi maka Indonesia menjadi salah satu pelopor terlaksananya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Namun, ternyata Indonesia bersinggungan dengan salah satu elemen dari MEA 2015, yaitu liberalisasi komoditas perdagangan, terutama beras dan gula.

3. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu negara. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu kepentingan

¹⁰ Papp, D. S. (1988). *"Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second*

yang dianggap mendasar, karena kualitas baik atau buruknya perekonomian suatu negara akan memengaruhi kehidupan negara tersebut. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi adalah turunan dari kepentingan nasional secara holistik dan merupakan salah satu kepentingan terpenting selain keamanan.

Ekonomi kesejahteraan mencoba untuk memaksimalkan tingkatan dari kesejahteraan sosial dengan pengujian kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat sebab ekonomi, kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran.¹¹

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun - 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun.

¹¹ Dan Lisela Arund Mis, Ekonomi Mikro, 1999

Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang dimaksud tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UU Tenaga Kerja, mereka dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia, dan anak-anak.

Dalam penelitian ini, pemenuhan tenaga kerja di produksi beras sejajar dengan peningkatan produksi beras domestik. Sehingga kecenderungan tenaga kerja untuk pindah ke sektor lain selain produksi beras akan mengancam sektor pangan nasional. Menurut Thomas Robert Malthus, pangan hanya bisa bertambah menurut deret hitung tetapi penduduk dunia bertambah menurut deret ukur. Artinya, pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan produksi makanan pokok tidak dalam laju yang sama.¹²

5. Ketahanan Pangan

Untuk dapat memenuhi poin (b) yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka kebutuhan primer, khususnya pangan, adalah indikator utama yang harus dipenuhi. Suatu

Ketahanan pangan (food security) adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, kapan pun, akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan pangan harian dan mencapai kehidupan yang aktif dan sehat.¹³

Menurut Ikuo Kume masyarakat memilih untuk mendukung proteksionisme pangan bahkan ketika resesi global sekalipun, karena sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang adalah petani yang merasa diuntungkan dalam kebijakan tersebut, sekaligus menyokong terbentuknya jaminan pangan dari dalam negeri.¹⁴ Sikap masyarakat globalisasi dan perdagangan dapat sama sekali berbeda tergantung aspek mana dalam hidup mereka terkena dampaknya.¹⁵

6. Proteksionisme

Kebijakan untuk melindungi industri-industri domestik terhadap kompetisi asing dengan media-media berupa tarif, subsidi, kuota impor, atau hal-hal lain yang memberatkan kegiatan impor. Tarif ditingkatkan agar harga jual barang impor naik, sehingga membuat komoditas tersebut menjadi kurang diminati oleh konsumen domestik. Kuota impor, yang membatasi kuantitas barang-barang yang dapat diimpor, adalah perangkat proteksionis lainnya. Peperangan dan depresi ekonomi menurut sejarah

¹³ Patel, Raj 2013: Food Sovereignty is Next Big Idea. Financial Times hal.10

¹⁴ Ikuo Kume 2010: Explaining Mass Support for Agricultural Protectionism (Evidence from a Survey Experiment During the Global Recession). Tokyo: Waseda University, hal. 35

¹⁵ Ibid, hal. 36

menghasilkan peningkatan proteksionisme, sedangkan perdamaian dan kemakmuran cenderung mendorong perdagangan bebas.¹⁶

Kebijakan proteksionis adalah umum di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 di bawah sistem merchantilism. Inggris Raya meninggalkan banyak peraturan-peraturan yang mendukung proteksionis pada abad ke-19, dan pada Perang Dunia I tarif-tarif diterapkan rendah di seluruh negara-negara Barat. Dislokasi ekonomi dan politik mendorong munculnya sekat-sekat bea cukai di Eropa pada tahun 1920-an, dan Great Depression memunculkan arus pembuat undang-undang yang bersifat proteksionis, dengan implikasi perdagangan dunia yang mengalami penyusutan.¹⁷

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam proteksionisme, dengan tarif-tarif yang mencapai angka-angka yang tinggi pada tahun 1820-an dan pada saat Great Depression, namun pada tahun 1947 negara ini menjadi satu dari 23 negara yang menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang mana tarif-tarif bea cukai secara besar dan memangkas atau menghapus kuota-kuota komoditas. Meskipun terdapat perjanjian-perjanjian perdagangan seperti GATT dan NAFTA, kecenderungan untuk proteksionis masih terdapat di banyak negara ketika domestik mendapat imbas negatif yang cukup besar dari kompetisi asing.¹⁸

¹⁶ merriam-webster.com/concise/protectionism

¹⁷ Loc cit

¹⁸ Loc cit

Kebijakan ekonomi yang menegaskan pentingnya tarif 'komoditas impor, pembatasan kuota, dan berbagai regulasi pemerintah yang dirancang untuk membentuk kompetisi yang adil antara aktor ekonomi domestik dan luar negeri.

D. Hipotesa

Indonesia menolak liberalisasi komoditas beras dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 karena liberalisasi beras pada MEA 2015 diprediksi membuat para produsen beras domestik kehilangan pangsa pasar dalam negeri sehingga angkatan kerja di bidang produksi beras mengalami penurunan dan berimplikasi Indonesia akan kembali tergantung pada impor beras tiap tahunnya.

E. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik dokumentasi yaitu menggunakan bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil kerja tahunan Kementerian-Kementerian terkait, dan media massa berupa data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah laporan hasil kerja tahunan yang dalam Renstra yang berisi evaluasi satu tahun ke belakang dan target untuk satu tahun ke depan dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) Kementerian Pertanian dan Perdagangan. itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku,

kaitan dengan masalah penelitian untuk dipilah dan dipilih berdasarkan data untuk mempermudah dalam menganalisisnya.

2. Prosedur Analisis

Proses penganalisisan data yang dimaksudkan adalah untuk mempermudah cara kerja peneliti, hal ini akan mempermudah dalam menggunakan instrumen penelitian.

Prosedur analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah:

- Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul selanjutnya, mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah.
- Hasil analisis diteliti kembali dan mungkin diperkuat lagi untuk ditetapkan menjadi data yang akurat dalam penelitian.
- Data yang sudah diseleksi kemudian dianalisis untuk menjawab semua masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.
- Data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan sehingga penelitian ini memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan rumusan masalah.

Penelitian ini berpusat pada eksplanasi proteksionis komoditas beras yang diterapkan pemerintah dalam MEA 2015. Penelitian ini juga berusaha menghubungkan konsumsi dan produksi beras nasional, pertumbuhan jumlah penduduk, dan harga beras impor dari Thailand dan Vietnam di pasar domestik. Dengan menggunakan teori ekonomi kesejahteraan menjelaskan kepentingan Indonesia untuk tidak mengikutsertakan

3. Sistematika Penulisan

Pada bab II akan dijelaskan kondisi umum pertanian produksi makanan pokok Indonesia, yaitu beras dalam jangka waktu 5 tahun (2009-2014). Mencakup kuota produksi, konsumsi per-tahun, jumlah tenaga kerja di bidang produksi beras, dan manajemen stok beras nasional terkini. Termasuk produksi padi tiap tahun yang diukur dalam ARAM (Angka Ramalan) dan juga ATAP (Angka Tetap) sesuai indikator yang digunakan oleh BPS. Selain itu, pada bab ini menjelaskan jumlah tenaga kerja di bidang produksi beras yang menurun dari tahun ke tahun dan perbandingan luas lahan pertanian dan pemukiman penduduk yang ternyata berpengaruh pada produktivitas.

Dilanjutkan dengan uraian di bab III yang akan menjelaskan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, berbagai kebijakannya dan posisi Indonesia sebagai negara yang menolak liberalisasi beras dan gula.

Kemudian pada bab IV akan diuraikan kepentingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan progress percepatan kesiapan pertanian Indonesia agar lebih mandiri untuk dapat beradaptasi dengan persaingan global yang semakin terbuka.

Dibab V dicantumkan kesimpulan yang mencakup jawaban dari rumusan masalah

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menjelaskan hubungan pengambilan kebijakan pembatalan beras sebagai salah satu komoditas yang diikutsertakan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan kepentingan nasional Indonesia itu sendiri.

2. Tujuan Khusus

- Mendeskripsikan kondisi sector pertanian penghasil beras di Indonesia yang berimplikasi pada pembatalan liberalisasi beras
- Mengungkapkan keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam proteksi komoditas beras lokal.
- Mendeskripsikan usaha pemerintah mengakselerasi produksi beras dan